

TESIS

**PATRONASE POLITIK DIBALIK FENOMENA DEFORESTASI HUTAN
DAN LAHAN : STUDI KASUS DI KABUPATEN KETAPANG DAN
KABUPATEN KAMPAR**



Zamzam Isnain Nasution

NIM : 071824453005

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

TESIS

**PATRONASE POLITIK DIBALIK FENOMENA DEFORESTASI HUTAN
DAN LAHAN : STUDI KASUS DI KABUPATEN KETAPANG DAN
KABUPATEN KAMPAR**



Zamzam Isnan Nasution

NIM : 071824453005

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

TESIS
PATRONASE POLITIK DIBALIK FENOMENA DEFORESTASI HUTAN
DAN LAHAN : STUDI KASUS DI KABUPATEN KETAPANG DAN
KABUPATEN KAMPAR



Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Ilmu Politik
Pada Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

Disusun Oleh :
Zamzam Isnan Nasution
NIM : 071824453005

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

PENULISAN TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL,
7 SEPTEMBER 2022

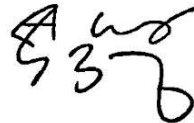
OLEH :

Pembimbing Ketua



Dr. Siti Aminah Dra., MA
NIP. 196502241989032002

Pembimbing Kedua



Dr. Aribowo Drs., MS
NIP. 195808011985021002

Mengetahui

Kepala Program Studi Magister Ilmu Politik



Dr. Kris Nugroho Drs., MA
NIP. 196203301988101001

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Tesis Berjudul

Patronase Politik Dibalik Fenomena Deforestasi Hutan Dan Lahan : Studi

Kasus Di Kabupaten Ketapang Dan Kabupaten Kampar

Telah Diuji

Pada Hari Rabu, Tanggal 7 September 2022. Bertempat di Gedung C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya.

Panitia Penguji Penilisan Tesis :

Ketua

1. Dr Dwi Windyastuti Budi H Dra., MA

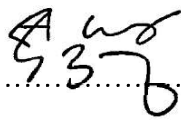
NIP. 196109271988102001



Anggota

1. Dr. Aribowo Drs., MS

NIP. 195808011985021002



2. Dr. Siti Aminah Dra., MA

NIP. 196502241989032002



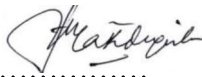
3. Airlangga Pribadi Kusman Ph.D

NIP. 197611232003121001



4. Dr. Antun Mardiyana Drs., MS

NIP. 196110311988101001



PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapat gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan atau catatan kaki dalam isi Tesis.

Apabila suatu saat nanti ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 7 September 2022



(Zamzam Isnani Nasution)

KATA PENGANTAR

Memasuki era globalisasi ini isu-isu lingkungan semakin terangkat karena maraknya eksploitasi sumber daya alam. Sejatinya pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menghambat laju perusakan sumber daya alam dengan turut serta menandatangani pakta Sustainable Development Goals, sebuah pakta global yang melarang pembangunan dengan mengorbankan aspek lingkungan. Namun, apa yang dicita-citakan seringkali bertolak belakang dengan penerapan di area sumber daya alam. Selama ini kegiatan deforestasi seringkali dianggap wajar dengan berlindung dibalik alasan peningkatan ekonomi daerah.

Ibarat pepatah ada gula ada semut, di hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah dengan potensi sumber daya alam melimpah selalu menjadi primadona bagi investor untuk mengakumulasi kekayaannya. Gelontoran modal yang menarik ini menjadi magnet bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi baru. Berbagai cara dilakukan untuk merubah hutan yang seharusnya dijaga menjadi perkebunan kelapa sawit, tambang batubara, tambang emas, gas alam dan sebagainya.

Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat dan Kabupaten Kampar di Provinsi Riau adalah dua contoh daerah yang begitu massif mengorbankan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Terdapat perputaran modal yang besar dan keterkaitan erat antara elite ekonomi, elite pemerintahan, penegak hukum, elite politik, elite sosial dan instrument pemerintahan lain. Dari adanya tarik ulur kepentingan didalamnya secara natural muncul interaksi antar aktor yang terlibat. Interaksi yang dirawat terus menerus memunculkan kepatuhan dalam sebuah sistem patronase didalamnya.

Interaksi dalam jejaring patronase di dua daerah memunculkan dinamika seru yang secara lengkap dijelaskan dalam penulisan tesis ini. tesis ini akan tersusun dalam enam bab. Naskah Thesis ini nantinya akan terdiri dari 6 bagian.

Pertama berisi pendahuluan. Pendahuluan disini berisi tentang latar belakang patronase dalam kaitannya fenomena eksploitasi sumber daya alam hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau juga menyinggung ruang studi yang diteliti dan ruang penelitian yang akan diambil. Selanjutnya dipertajam dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian agar penelitian jelas arahnya hingga dapat diintisari sebuah manfaat dari penelitian ini.. *Kedua*, untuk membingkai penelitian agar tetap pada jalurnya peneliti menggunakan kerangka konseptual dan teori yang relevan terhadap penelitian ini. Dimulai dengan analisis studi terdahulu agar dapat ditemukan sebuah kebaharuan dan pijakan teori yang dapat menggambarkan ruang berpikir peneliti dalam menganalisis fenomena dan data yang didapat nantinya.

Pada bab *Ketiga* berisi olah metodologis dimana akan dijelaskan bagaimana frame berfikir thesis ini bekerja. Nantinya akan ditambahkan juga bagan analisis yang membantu pembaca dalam memahami thesis ini. Keempat akan menjabarkan data mentah berupa gambaran umum penelitian sebagai data dorong yang berguna bagi penyusunan analisis di bab selanjutnya.

Pada bab *Kelima* akan dijelaskan mengenai temuan dan analisis data yang didapat, sistematika penulisan akan mengikuti hasil yang didapat pasca turun lapangan. Analisis pada bab kelima akan menggambarkan fenomena yang ada dan menjadi kunci penulisan thesis ini. banyak keunikan dan perilaku-perilaku khusus yang tidak terjadi di daerah lain Terakhir, pada bab *keenam* akan berisi mengenai gambaran keseluruhan dalam thesis ini dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang dapat digunakan untuk memahami keseluruhan isi thesis ini.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu perlu kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya. Namun, dalam kesederhanaan yang ada diharapkan tulisan ini mampu mengisi ruang dalam studi politik patronase berbalut politik lingkungan. dengan adanya variasi-variasi pemikiran baru diharapkan dapat memantik ide-ide dalam mengisi ruang akademis lainnya.

Akhir kata, penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari bapak dan ibu dosen, kawan-kawan seperjuangan, keluarga, dan stakeholder terkait yang memberikan waktu dan sumbangsih pemikiran. Penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Surabaya, 7 September 2022

Zamzam Isnani Nasution

RINGKASAN

Politik lingkungan yang pada saat ini terus mendapatkan perhatian menghasilkan banyak variasi-variasi baru dalam sudut pandang analisisnya. Memotret deforestasi dengan bingkai patronase politik adalah sebuah kebaharuan yang tentunya akan menghasilkan sudut pandang analisis yang berbeda. Tesis ini adalah sebuah kebaharuan yang seharusnya relevan dengan kondisi pada saat ini.

Tesis ini dikonstruksi dari sebuah fakta bahwa deforestasi hutan dan lahan yang tak dapat lagi terbendung pada masa kini. Eksploitasi besar-besaran sudah menjadi fenomena yang biasa terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyatakan apabila tidak dihambat, maka kurang dari seratus tahun kedepan seluruh tegakan pohon yang ada di Indonesia.

Deforestasi hutan dan lahan salah satunya disebabkan oleh pemerintah daerah yang lemah dalam pengawasan maupun terlalu tamak dalam mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang ada. Dengan bantuan teori patronase politik James Scott dan Edward Aspinall, tulisan ini mengupas bagaimana patronase politik terjadi sebagai implikasi adanya deforestasi di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Aliran modal yang besar membuat kepala daerah seringkali tak berdaya dan disandera oleh kepentingan para investor.

Di Kabupaten Kampar elite ekonomi bisa dibilang lebih dominan disbanding elite politik, dimana elite ekonomi mampu menjadi patron dan melakukan kontrol terhadap diskresi. Sedangkan di Kabupaten Ketapang elite politik bisa dibilang sedikit lebih kuat karena masih dapat menggunakan kekuatan pemerintahannya lebih lanjut, berbagai variasi pertukaran dalam hubungan patron-klien dapat selengkapnya dibaca dalam naskah lengkap tesis ini.

SUMMARY

Environmental politics which at this time continues to receive attention produces many new variations in the point of view of his analysis. Photographing deforestation with the frame of political patronage is a novelty which will certainly produce a different point of view of analysis. This thesis is a novelty that should be relevant to the current conditions.

This thesis is constructed from the fact that deforestation of forests and land is unstoppable at present. Massive exploitation has become a common phenomenon throughout Indonesia. The Ministry of Environment and Forestry stated that if it is not stopped, it will be less than a hundred years from now all tree stands in Indonesia.

One of the causes of deforestation of forests and lands is local governments that are weak in supervision or too greedy to take advantage of existing natural resources. With the help of the political patronage theory of James Scott and Edward Aspinall, this paper explores how political patronage occurs as an implication of deforestation in Kampar Regency, Riau Province and Ketapang Regency, West Kalimantan Province. The large flow of capital makes regional heads often helpless and held hostage by the interests of investors.

In Kampar Regency, the economic elite is arguably more dominant than the political elite, where the economic elite is able to become patrons and exercise control over discretion. While in Ketapang Regency the political elite is arguably a little stronger because it can still use its government power further, various variations of exchange in patron-client relationships can be read in full in the full text of this thesis.

ABSTRAK

Patronase politik adalah hubungan yang tidak seimbang antara patron dan klien, dimana patron mampu mengatur berjalannya kehidupan klien, sedangkan klien tunduk dan patuh dalam perintah dan aturan patron (Scott, 1972). Patronase politik di Kabupaten Ketapang Provinsi Riau dan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat terbingkai dalam deforestasi hutan dan lahan yang massif terjadi disana. Penelitian ditulis secara kualitatif dengan format deskriptif menjelaskan secara rinci fenomena pertukaran yang terjadi antara elite ekonomi, elite politik, elite pemerintahan, elite sosial dan instirusi lainnya. dimulai dari berakhirnya masa orde baru dan berkembangnya desentralisasi, patronase tumbuh dan berkembang dalam banyak aspek, diantaranya ekonomi, pembangunan, pemilu, dan tata pemerintahan. Terdapat ciri pembeda antara patronase dengan hubungan timbal balik lainnya, yaitu ketidaksetaraan, bertatap muka (face to face), dan fleksibilitas hubungan. Ciri pembeda ini yang digunakan oleh elit politik lokal untuk menggalang dukungan dan merawat stabilitas politik di Kabupaten Kampar. Keduanya daerah telah melewati masa puncak deforestasi dan telah berubah massif menjadi perkebunan kelapa sawit dan tambang. Elite ekonomi seringkali mendominasi dengan mengintervensi segala aspek. Menggunakan konsep gelinding roda lepas cocok untuk menganalisis apa yang terjadi di kedua daerah.

Kata Kunci : Patronase, Deforestasi, Eksploitasi, Dominasi

ABSTRACT

Political patronage is an unequal relationship between the patron and the client, where the patron is able to regulate the life of the client, while the client is submissive and obedient to the orders and rules of the patron (Scott, 1972). Political patronage in Ketapang Regency, Riau Province and Ketapang Regency, West Kalimantan Province is framed in the massive deforestation of forest and land that occurs there. The research was written qualitatively in a descriptive format explaining in detail the phenomenon of exchange that occurred between economic elites, political elites, government elites, social elites and other institutions. starting from the end of the New Order era and the development of decentralization, patronage grew and developed in many aspects, including the economy, development, elections, and governance. . There are distinguishing features between patronage and other reciprocal relationships, namely inequality, face to face, and relationship flexibility. This distinguishing feature is used by local political elites to garner support and maintain political stability in Kampar Regency. Both areas have passed the peak of deforestation and have been transformed massively into oil palm plantations and mining. The economic elite often dominates by intervening in all aspects. Using the loose wheel rolling concept is suitable for analyzing what is happening in both areas.

Keywords: Patronage, Deforestation, Exploitation, Domination

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
Lembar Persetujuan	iv
Penetapan Panitia Penguji Tesis	v
Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat	vi
Kata Pengantar	vii
Ringkasan	x
Summary	xi
Abstrak	xii
Abstract	xiii
Daftar Isi	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9

BAB II : KERANGKA BERPIKIR : MEMAHAMI PATRONASE

2.1. Telaah Pustaka	11
2.2. Pijakan Teoritis	15

BAB III : METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	29
------------------------------	----

3.2. Fokus Penelitian	30
3.3. Lokasi Penelitian	30
3.4. Subjek Penelitian	31
3.5. Instrumen Penelitian	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data	32
3.7. Teknik Analisis Data	33
3.8. Sistematika Penulisan	34
 BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
4.1. Kabupaten Ketapang	36
4.1.1. Sejarah Kabupaten Ketapang	36
4.1.2. Kondisi Geografis dan Potensi di Kabupaten Ketapang	37
4.1.3. Kondisi Demografi dan Etnografi Kabupaten Ketapang	39
4.1.4. Pemerintahan Kabupaten Ketapang	42
4.1.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang	47
4.1.6. Partai Politik Di Kabupaten Ketapang	49
4.1.7. Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Ketapang	51
4.1.8. Institusi Berpengaruh Terhadap Deforestasi di Ketapang	56
4.2. Kabupaten Kampar	65
4.2.1. Sejarah Kabupaten Kampar	65
4.2.2. Kondisi Geografis dan Potensi di Kabupaten Kampar..	65
4.2.3. Kondisi Demografi dan Etnografi Kabupaten Kampar	69

4.2.4. Pemerintahan Kabupaten Kampar	71
4.2.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar	76
4.2.6. Partai Politik Di Kabupaten Kampar	77
4.2.7. Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Kampar	79
4.2.8. Institusi Berpengaruh Terhadap Deforestasi di Kampar	83
 BAB V : PATRONASE DI KABUPATEN KETAPANG DAN KAMPAR	
5.1. Patronase Terbentuk Dan Bekerja	92
5.2. Elite Politik Lokal Menjaga Berjalannya Patronase	115
5.3. Keunikan Patronase Di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kampar ...	145
5.4. Membingkai Pendekatan Patronase Ala Aspinall	155
 BAB VI : PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	160
6.2. Saran	163
Daftar Pustaka	165